

REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah DIY.  
 Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik secara Profesional  
 Sasaran Strategis : 1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik secara Profesional  
 Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Kualitas Manajemen SDM Aparatur

REGISTER RESIKO BKD DIY TA 2021  
 SETELAH PENDAMPINGAN DENGAN INSPEKTORAT

No.	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/ C	Uraian Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Target Waktu
				No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersusunnya Formasi Pegawai Tahunan dengan Target proyeksi 1 Dokumen	1	Terdapat usulan E-formasi yang sudah tidak sesuai kebutuhan	a. Adanya perubahan Lembaga/SOTK dan/atau adanya perubahan nomenklatur/ kualifikasi jabatan dari Biro Organisasi b. usulan e-formasi terisi pegawai mutasi dari luar Pemda DIY yang bersumber dari dokumen usulan	a. UC b. C	a. Formasi ASN yang tidak sesuai Pergub kualifikasi jabatan b. Formasi ASN sudah terisi dari pegawai mutasi sehingga terjadi kelebihan formasi jabatan	a. Koordinasi dengan Kemenpan untuk penyesuaian formasi (Jika sebelum adanya pengadaan bisa mengubah formasi jika setelah pengadaan harus menunggu diangkat pns) b. Koordinasi dengan Subbidang Mutasi agar tidak terjadi duplikasi antara : usulan formasi dengan pegawai mutasi.	4	2	8	Sedang	Memperbarui e-formasi yang valid, melakukan desk kepada Instansi dalam pengisian formasi serta melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi terkait perubahan SOTK dan Kualifikasi jabatan serta Subbidang Mutasi terkait formasi pegawai mutasi dari luar Pemda DIY	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
			Tersusunnya Proyeksi Kebutuhan Pegawai (1 dokumen untuk proyeksi 5 tahunan)	2	Informasi Antara ABK dengan usulan pegawai tidak sesuai	Data proyeksi yang di entry oleh Pengelola kepegawaian tidak sesuai dengan Pergub Klasifikasi jabatan ABK	C	Jumlah Proyeksi kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dengan pergub kualifikasi Jabatan (ABK)	Koordinasi dan sosialisai atas penyusunan Proyeksi kebutuhan Pegawai dengan pengelola Kepegawaian	3	2	6	Sedang	Memperbarui isian formulir bezzeting setiap tahunnya sesuai ketentuan	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pengembangan Aplikasi Si Seksi CAT milik Pemda	3	Pengembangan Aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan	Kompetensi Penyedia kurang memadai dalam pengembangan aplikasi sehingga Belum tersedianya menu : live scor, soal bergambar, upload berkas sering eror dll di menu Si Seksi	UC	Pelaksanaan Seleksi tenaga bantu dengan aplikasi kurang optimal	Memberdayakan PNS di BKD yang berbasis TI untuk mendukung pelaksanaan seleksi Tenaga Bantu.	4	3	12	Tinggi	memperjelas spesifikasi KAK Atas Aplikasi Si seksi CAT	Kabid PP dan Simpeg	1 TA

		Terlaksananya Rekrutmen Pegawai Sesuai Formasi sebanyak 3500 orang/formasi yang terdiri atas 3250 tenaga bantu dan 250 seleksi cpns dan pppk	4	Tidak terselenggaranya pengadaan CPNS dan PPPK	Tidak ada kebijakan Pengadaan dari Pemerintah Pusat	UC	kebutuhan formasi ASN tidak terpenuhi sejumlah 250 orang formasi	Berkoodinasi dengan Kemenpan dan BKN terkait rekrutmen ASN	4	3	12	Tinggi	1. Berkoodinasi/bersurat kepada TAPD terkait penggunaan anggaran 2. Berkoodinasi dengan Kemenpan dan BKN terkait rekrutmen ASN	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terbitnya SK Pegawai Pensiun Akurat dan Tepat Waktu Sejumlah 700 PNS	5	Penerimaan SK Pensiun tidak tepat waktu	Keterlambatan pengusulan SK pensiun OPD	C	Tertundanya penerimaan uang pensiun	Verifikasi dan validasi data usulan pensiun dan Koordinasi dengan Instansi terkait	3	3	9	Tinggi	Pembuatan Aplikasi Pengendalian Pensiun	Kabid TUK	1 TA
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Aplikasi Layanan Kepegawaian Aplikasi Baru dan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Berbasis Mobile Application, Sistem Informasi Presensi Mobile bagi Non PNS/Tenaga Bantu) 2 aplikasi	6	Aplikasi e-prima belum bisa digunakan oleh Nabab)	Belum ada nya Nomor Induk khusus Nabab yang disepakati akan digunakan sebagai ID bagi Nabab di Aplikasi Simpeg	C	Nabab belum bisa Menggunakan Aplikasi E-Prima	koordinasi antar bidang yang mengampu sistem layanan kepegawaian	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan bidang terkait dengan subbid terkait penentuan Nomor ID untuk Nabab	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
		Tersedianya ID Card PNS Pemda DIY 800 ID Card untuk mutasi dan CPNS	7	Tidak tercapainya target pengadaan 800 id card	PNS pada saat pengambilan foto ID card tidak berada di tempat	C	Sebagian PNS tidak bisa memiliki ID Card	Koordinasi instansi terkait thdp pegawai yg belum mempunyai Id Card dan Inventarisasi PNS yang belum mempunyai ID Card	2	2	4	rendah	Koordinasi instansi terkait thdp pegawai yg belum mempunyai Id Card dan Inventarisasi PNS yang belum mempunyai ID Card	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
		Laporan data monev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota 12 laporan	8	Laporan Monev kurang Valid sehingga terdapat ketidaksamaan kondisi riil/sebenarnya pegawai dengan database SIMPEG	Pengadministrasi kepegawaian kurang teliti dalam menyusun laporan hasil validasi data atau Monev	C	database SIMPEG belum terupdate sesuai keadaan riil	koordinasi dengan pengelola layanan kepegawaian di setiap Bidang di BKD DIY	3	3	9	Tinggi	melakukan updating data secara periodik dan meningkatkan kapabilitas Pengelola Kepegawaian	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
		Mesin Presensi Terpelihara dengan Baik 150 Mesin dengan Pengadaan Jasa	9	Penyelesaian perbaikan peralatan tidak dapat segera diselesaikan/dilaksanakan	Kurangnya Koordinasi pengguna dengan pengelola mesin presensi	C	Mesin Presensi tidak dapat digunakan	koordinasi dengan Instansi terkait dan penyedia jasa pemeliharaan mesin presensi	3	3	9	Tinggi	Melakukan pemeliharaan terhadap mesin presensi dan pembinaan PNS di Lingkungan Instansi masing-masing	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen Perorangan/Sinkronisasi Letak Dokumen Fisik dan Elektronik 1 Paket	10	Dokumen kepegawaian perorangan tidak tertata dengan baik sesuai NIP	Dokumen Kepegawaian limpahan dari PPPD belum dikelola dengan baik	C	Pencarian dokumen kepegawaian perorangan sulit ditemukan dan berpotensi hilang	Penataan dokumen kepegawaian secara internal dan pihak ketiga	2	3	6	sedang	Melakukan penataan dokumen kepegawaian yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga	Kabid TUK	1 TA
		Pengembangan Aplikasi Arsip dan Buku Tamu 2 Aplikasi	11	Aplikasi tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan terkini karena terjadi error	Aplikasi belum memiliki fitur yang dibutuhkan saat ini	C	1.Data dan dokumen tidak up to date 2. Tamu yang datang untuk konsultasi tidak terdokumentasi	Evaluasi aplikasi untuk memenuhi kebutuhan terkini	2	2	4	rendah	Mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan terkini dengan menyusun KAK spesifikasi sesuai kebutuhan	Kabid TUK	1 TA

			Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg) 300 Kartu	12	Tidak terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan kepastian hukum terhadap identitas pegawai Pembuatan 300 Kartu identitas terlambat	PNS tidak menganggap pentingnya kartu identitas pegawai sebagai wujud tertib administrasi kepegawaian dan kepastian hukum dari yang bersangkutan dan keterlambatan usulan dari opd	C	Tidak terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan kepastian hukum terhadap identitas pegawai	Verifikasi data yang belum memiliki data kartu identitas pegawai	2	2	4	rendah	Koordinasi antar bidang dan Instansi terkait	Kabid TUK	1 TA
			Sertifikasi Layanan Mutu 1 Sertifikat	13	Sertifikat ISO tidak terbit	Hasil Audit Eksternal ada yang bersifat temuan mayor	C	Standar pelayanan bidang kepegawaian yang diragukan kredibilitasnya	Mengoptimalkan audit internal dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang ada	2	3	6	sedang	Meningkatkan koordinasi antar bidang	Kabid TUK	1 TA
			Sosialisasi Dokumen Elektronik 240 Orang	14	Tidak tersedianya dokumen elektronik kepegawaian ketika dibutuhkan	Data/dokumen elektronik pegawai tidak lengkap	C	Proses kepegawaian PNS yang bersangkutan terhambat	Melengkapi dokumen kepegawaian yang kurang lengkap untuk kebutuhan administrasi kepegawaian yang mendesak	3	3	9	sedang	Koordinasi antar bidang dan instansi terkait guna melengkapi dokumen kepegawaian	Kabid TUK	1 TA
1			Survei Kepuasan Masyarakat 1 Laporan	15	Target pemenuhan data IKM tidak terpenuhi	Tidak semua responden mengisi kuesioner secara lengkap	C	IKM tidak menunjukkan kualitas layanan atau tingkat kepuasan masyarakat	Mendorong setiap unit layanan untuk meminta respons terhadap layanan kepegawaian berupa survei kepuasan masyarakat dengan Survey dilakukan dengan Aplikasi	2	3	6	sedang	Mengoptimalkan pendistribusian kuesioner SKM sehingga menjadi Aplikasi dan Fisik	Kabid TUK	1 TA
			Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif 350 SK	16	Tatanan dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif yang tidak tertelusur	Pencipta dokumen kepegawaian tidak tertib dalam proses penciptaan dokumen kepegawaian yang didokumentasikan	C	Tata kelola dokumen kepegawaian yang tidak tertib (lengkap) berefek kepada tatanan dokumen kepegawaian yang tidak tertelusur	Melakukan penagihan dokumen kepegawaian yang belum dikirimkan untuk dokumentasi	3	3	9	sedang	Koordinasi antar bidang pencipta dokumen kepegawaian	Kabid TUK	1 TA
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Kajian Manajemen ASN 1 Dokumen	17	Manajemen ASN kurang tertata dengan baik	Belum ada kebijakan internal	C	Perencanaan Suksesi belum dilakukan	Membuat rancangan Pedoman Perencanaan Suksesi	3	4	12	sedang	Penguatan profil data kepegawaian	Kabid Pengembangan	1 TA
			Terbitnya SK Mutasi dan Rotasi Jabatan Pelaksana 200 SK	18	Terdapat jabatan pelaksana yang tidak terisi	Syarat Administrasi tidak sesuai	C	Proses mutasi tertunda	Verifikasi syarat dokumen	2	4	8	rendah	Koordinasi dengan Instansi terkait	Kabid Pengembangan	1 TA
			Terbitnya SK Pengangkatan Aparatur (mutasi) PNS 75 SK	19	Proses mutasi antar daerah terhambat	Syarat Administrasi kurang lengkap dan waktu yang lama	C	Proses mutasi antar daerah tertunda	Verifikasi syarat dokumen dan koordinasi secara aktif	2	3	6	rendah	Check list jpeserta mutasi antar daerah	Kabid Pengembangan	1 TA

	Bu Novi	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terbitnya PNS yang Naik Pangkat Akurat dan Tepat Waktu 900 SK	20	Penerimaan SK Kenaikan Pangkat tidak tepat waktu	Keterlambatan pengusulan KP dari OPD	UC	Tertundanya penerimaan kenaikan gaji	Verifikasi dan validasi data usulan KP Sudah menggunakan sistem	3	4	12	Tinggi	Koordinasi dengan Instansi terkait (V	Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian	1 TA
		Pengelolaan Promosi ASN	Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 2 SK	21	terdapat jabatan pimpinan tinggi yang terisi	dokumen seleksi tidak lengkap, kuota peserta yang mendaftar tidak terpenuhi dan kompetensi peserta tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan	UC	Menghambat kinerja organisasi perangkat daerah	Verifikasi syarat dokumen	3	6	18	tinggi	Membangun merit sistem	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	1 TA
			SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V) dan Kepala Sekolah 150 SK	22	Terdapat administrator pengawas dan kepala sekolah yang tidak terisi	Tidak ada usulan instansi	UC	Menghambat kinerja organisasi perangkat daerah	Verifikasi syarat dokumen	3	4	12	Tinggi	Membangun kelompok suksesi	Kabid Pengembangan	1 TA
	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling kelompok 50 orang	23	Hasil dari bimbingan konseling tidak optimal sehingga Permasalahan tidak terselesaikan	Konselor tidak memiliki kompetensi mengatasi permasalahan di luar keahliannya	C	Penyelesaian permasalahan konsellee tidak tuntas	Menyesuaikan kompetensi psikolog dengan jenis permasalahan konsellee	3	3	9	Tinggi	Tim Konselor Melakukan pendataan awal terhadap jenis permasalahan konsellee secara lebih cermat dan mendalam	Kepala Balai PKP	1 TA
			Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling pribadi 20 Orang	24	Hasil dari bimbingan konseling tidak optimal sehingga Permasalahan tidak terselesaikan	Ketidaklengkapan informasi dari OPD Pengirim	UC	penyelesaian masalah belum optimal	Membagi kelompok pada konseling sesuai jenis permasalahan	3	3	9	Tinggi	Memetakan permasalahan agar lebih homogen pada suatu kelompok dan Melakukan koordnasi dengan OPD Terkait (Pengirim)	Kepala Balai PKP	1 TA
			Koordinasi dalam kerja sama pengukuran Kompetensi di 5 Kabupaten/Kota	25	Tidak terpenuhi kepastian data rencana kerjasama pengukuran Kompetensi di 5 kab/Kota Khusus DIY)	Keterlambatan Pelaksanaan Koordinasi tentang rencana kerja sama pengukuran Kompetensi	C	Kerjasama pengukuran tidak dapat dilakukan	Koordinasi lisan secara intensif dengan pengelola dari mitra kerja sama	3	3	9	Tinggi	Rencana penjadwalan kegiatan rakor kerja sama diubah menjadi akhir tahun	Kepala Balai PKP, Kasie HAL&SK	1 TA
			Terselenggaranya Kemitraan kerjasama Pengukuran 40 orang	26	Tidak terpenuhinya mitra terutama dengan mitra luar daerah	Kurang dilakukannya koordinasi secara optimal	C	Kemitraan kurang terjaga	Koordinasi lisan secara intensif dengan stakeholder / instansi yang dimohon untuk menjadi narasumber	2	3	6	sedang	Agar dilakukan koordinasi secara lebih insentif terhadap peserta kemitraan terutama dari luar daerah	Kepala Balai PKP, Kasie HAL&SK	1 TA
			Kesesuaian pelaksanaan Pengukuran kompetensi SDM dalam jabatan dengan output profil kompetensi dalam DIY 320 orang	27	Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi tidak tepat waktu)	- Tidak dapat terprediksi perolehan ijin dari Kemendagri untuk pelaksanaan Seleksi JPT	UC	-Tertunda atau tidak dapat diselenggarakan	Koordinasi antar bidang, dengan instansi terkait dan mitra kerja	3	3	9	rendah	Koordinasi antar bidang, dengan instansi terkait dan mitra kerja	Kepala Balai PKP	1 TA

			Kesesuaian Pengukuran kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY 108 orang	28	Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi tidak tepat waktu)	- Tidak dapat terprediksi perolehan ijin dari Kemendagri untuk pelaksanaan Seleksi JPT	UC	-Tertunda atau tidak dapat diselenggarakan	Koordinasi dengan instansi terkait dan mitra kerja	3	3	9	rendah	Koordinasi antar bidang, dengan instansi terkait dan mitra kerja	Kepala Balai PKP	1 TA
			Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY 200 orang	29	Tidak seluruh pesertayang direncanakan hadir pada pelaksanaan pengambilan data sesuai jadwal yang ditetapkan)	- Undangan/Informasi untuk melaksanakan pengambilan data terlambat atau tidak sampai ke peserta)	UC	-Target peserta yang telah direncanakan tidak bisa dipenuhi	Koordinasi antar bidang, dengan instansi terkait dan mitra kerja	3	3	9	rendah	Koordinasi antar bidang, dengan instansi terkait dan mitra kerja	Kepala Balai PKP	1 TA
			Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan 2 laporan	30	Target pemenuhan data IKM tidak terpenuhi)	Tidak semua responden mengisi kuesioner secara lengkap	C	IKM tidak menunjukan kualitas layanan atau tingkat kepuasan masyarakat	Melakukan evaluasi terhadap teknis penyebaran kuesioner	3	3	9	Tinggi	Mengoptimalkan pengawasan saat pendistribusian kuesioner SKM (Survey IKM dilakukan melalui Aplikasi)	Kepala Balai PKP, Kasie HAL&SK	1 TA
			Perjanjian kerja sama pengukuran kompetensi 10 PKS	32	Tidak terwujudnya perjanjian kerja sama pengukuran kompetensi dengan suatu daerah/mitra	Mitra membatalkan rencana kerja sama	UC	Bekurangnya potensi pendapatan asli daerah	Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Seksi Pengukuran dan Pengujian serta mitra kerja sama	3	3	9	Tinggi	Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Seksi Pengukuran dan Pengujian serta mitra kerja sama	Kepala Balai PKP, Kasie HAL&SK	1 TA
			SDM Assessor dan Non Assessor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun 20 orang	33	Assesor tidak dapat mengikuti pelatihan dan bimtek	Jadwal assesor penuh	C	Tidak ada peningkatan kompetensi assesor)	Koordinasi antar bidang terkait pelatihan assessor	2	2	4	rendah	Penyusunan jadwal pelaksanaan pelatihan bagi assesor	Kepala Balai PKP, Kasie HAL&SK	1 TA
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Ijin Dinas Luar Negeri 50 Surat	35	Surat ijin Gubernur ke luar negeri tidak diproses	Pengiriman surat permohonan ijin Gubernur ke luar negeri dari SKPD/Kab./Kota terlambat	UC	Surat ijin Gubernur ke luar negeri tidak keluar	Koordinasi dan verifikasi surat ijin Gubernur ke luar negeri	3	2	6	Sedang	Sosialisasi dan koordinasi mekanisme ijin dinas luar negeri dengan instansi terkait	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	1 TA
			Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi (AKD) 1 Laporan	36	Penyusunan AKD/ RPK terlambat	Data yang dikumpulkan kurang lengkap/terlambat	C	Jenis pengembangan kompetensi untuk masing-masing pegawai menjadi kurang sesuai	Sosialisasi dan Koordinasi dengan instansi terkait	3	2	6	Sedang	Sosialisasi dan Koordinasi dengan instansi terkait	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	1 TA
			PSN yang Peserta Ujian Dinas 260 Orang	37	Terdapat PNS yang diusulkan tidak dapat mengikuti ujian dinas	tidak memenuhi persyaratan	UC	Target peserta tidak terpenuhi	Sosialisasi dan Koordinasi dengan instansi terkait	2	3	6	Sedang	Mengirim surat edaran terkait rencana pelaksanaan ujian dinas. Sosialisasi dan Koordinasi dengan instansi terkait	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	1 TA

	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	ASN yang Mendapat Beasiswa Tugas belajar, Ijin Belajar dan Iktan Dinas (Beasiswa S3 : 2 orang, S2 :20 orang, S1 : 98 orang, D4 : 110 orang) 1 Tahun	38	Jumlah yang dikirim tidak sesuai dengan target	Pegawai yang mendaftar beasiswa kurang memenuhi persyaratan	C	Pengembangan kompetensi jalur pendidikan menjadi tidak optimal	Koordinasi dengan instansi terkait	2	3	6	rendah	Adanya mekanisme penentuan program studi untuk pengembangan kompetensi pegawai jalur pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan Pemda DIY dan ketersediaan pegawai calon peserta beasiswa di OPD	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	1 TA
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Surat Perintah Tugas Pelatihan Kepemimpinan dan Teknis/Fungsional yang Dikirim ke Diklat (Pelatihan (PKN Tk. II: 5 org, PKA: 15 org, PKP: 25 org, T/F: 200 orang, Bimtek Nabab 1390 org) 1 Tahun	39	Data kepegawaian pengembangan kompetensi yang kurang update	Data pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi tidak diupdate di database	C	Pengembangan kompetensi jalur pelatihan menjadi tidak optimal	Koordinasi dengan antar bidang dan instansi terkait untuk melakukan updating data pengembangan kompetensi	2	4	8	Sedang	Optimalisasi dan validasi data pengembangan kompetensi di database SIMPEG	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	ASN yang paham akan proses Sertifikasi Kompetensi 30 orang	40	tidak semua jenis jabatan fungsional dapat dilakukan sosialisasi	keterbatasan anggaran dan banyaknya jenis jabatan fungsional	C	ASN fungsional DIY kurang paham akan proses sertifikasi kompetensi	koordinasi dengan Pengadministrasian kepegawaian kepegawaian tiap OPD dan bidang pengembangan pegawai	3	3	9	Tinggi	rencana pemetaan jadwal sosialisasi setiap tahun untuk setiap jenis jabatan fungsional (Koordinasi dengan pengampu)	Kepala Balai PKP, Kasie HAL&SK	1 TA
		Pejabat Fungsional DIY yang tersertifikasi kompetensi 30 orang	41	Tidak terselenggaranya fasilitasi uji sertifikasi kompetensi	Tidak cukup anggaran untuk menyelenggarakan fasilitasi uji sertifikasi kompetensi (j)	C	Tidak terpenuhinya target JF yang ikut uji (sertifikasi)	koordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tiap OPD dan bidang pengembangan pegawai )	3	3	9	Tinggi	koordinasi dengan Instansi Pembina	Kepala Balai PKP, Kasie HAL&SK	1 TA
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Fungsional 100 SK	42	terdapat jabatan fungsional yang belum terisi	Belum memenuhi persyaratan da formasi	C	Karier PNS yang tertunda	Verifikasi formasi dan bezetting	3	4	12	Tinggi	Membuat Surat Edaran ke Instansi terkait pengisian Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda DIY dan membentuk Forum Pejabat Fungsional	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	1 TA
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Paham tentang Penilaian TPP 250 PNS	43	TPP yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya	Kesalahan penghitungan TPP oleh SKPD	C	Terjadi ketidakpuasan PNS di lingkungan Pemda DIY	Meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam perhitungan TPP	2	4	8	sedang	Mengoptimalkan pendampingan dalam perhitungan TPP dan mengakomodasi kekurangan TPP	Kabid KH dan Kesra	1 TA
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	ASN yang Terseleksi untuk Mengikuti Lomba dalam PORNAS KORPRI XVI (cabang Bola Voli) 1 Cabang Olahraga	44	Peserta yang mengikuti lomba tidak optimal	Terdapat peserta yang ditunjuk berhalangan mengikuti lomba	C	Kurang berprestasi dalam pelaksanaan PORNAS KORPRI]	Meningkatkan latihan bersama	2	4	8	sedang	Mengoptimalkan latihan bersama dan memonitoring persiapan lomba sejak jauh hari	Kabid KH dan Kesra	1 TA
		ASN yang Terseleksi untuk Mengikuti MTQ Tk. Nasional (Tilawah, Tartil, Dakwah & Hifdzil) 4 Cabang Lomba	45	Peserta yang mengikuti lomba tidak optimal	Terdapat peserta yang ditunjuk berhalangan mengikuti lomba	C	Kurang berprestasi dalam pelaksanaan MTQ KORPRI TK Nasional]	Meningkatkan latihan pedampingan	2	4	8	sedang	Mengoptimalkan latihan dan pedampingan dan memonitoring persiapan lomba sejak jauh hari	Kabid KH dan Kesra	1 TA

	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pegawai yang Menerima Satya Lancana Karyasatya 450 Orang	46	PNS yang diusulkan tidak mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya	Usulan terlambat dikirimkan ke BKD dan format yang dikirim tidak sesuai dengan format yang disyaratkan	C	Pegawai tidak mendapatkan kepuasan atas penghargaan sesuai yang seharusnya	Koordinasi dengan instansi terkait	3	2	6	sedang	Mengirim surat edaran ke instansi di lingkungan Pemda DIY dan konfirmasi ke OPD yang masih terdapat kekurangan berkas)	Kepala Bidang KHP dan Kesra	1 TA
		PNS dan Nabab yang Terfasilitasi JKK/JKM 10 Orang (5 Orang)	47	PNS yang mengalami kecelakaan / Meninggal tidak mendapatkan JKK / JKM	Berkas yang diusulkan opd terlambat dan atau tidak sesuai ketentuan/kriteria	C	Berkas yang diusulkan tidak diproses (Keluarga tidak mendapatkan hak ahli waris yang semstinya)	Koordinasi dengan instansi terkait	2	3	6	sedang	Sosialisasi dengan instansi terkait ketentuan terbaru 2. Konfirmasi ke OPD yang masih terdapat kekurangan berkas)	Kepala Bidang KHP dan Kesra	1 TA
	Pembinaan Disiplin ASN	Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara 200 Surat	48	Sanksi bagi PNS yang tidak tertib administrasi kepegawaian	[PNS kurang memahami Peraturan kepegawaian	C	Tertib administrasi kepegawaian tidak tercapai	Meningkatkan koordinasi dengan Innstansi terkait	1	2	2	rendah	Sosialisasi/Bimtek tentang peraturan disiplin kepegawaian	Kabid Kedudukan Hukum dan Kesra Pegawai	1 TA
		PNS yang paham pengisian LHKPN 150 Orang	49	Pelaporan eLHKPN tidak tercapai 100%	Rendahnya kesadaran PNS dalam mengisi eLHKPN	C	Kredibilitas Pejabat di lingkungan Pemda DIY masih kurang	Membuat surat edaran tentang wajib lapor eLHKPN bagi Pejabat di lingkungan Pemda DIY dan melakukan pendampingan wajib lapor eLHKPN	3	4	12	sedang	Penerapan sanksi bagi Pejabat yang tidak melaporkan eLHKPN	Kabid Kedudukan Hukum dan Kesra Pegawai	1 TA
		PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian 100 Orang	50	Banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tetapi tidak dikenakan sanksi	[Atasan langsung tidak melaksanakan tugas fungsinya dengan baik dan kurang memahami peraturan]	C	Tertib administrasi kepegawaian tidak tercapai	Koordinasi antar bidang dan Instansi terkait	1	2	2	rendah	Sosialisasi terkait aturan kepegawaian	Kabid Kedudukan Hukum dan Kesra Pegawai	1 TA
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 14 kasus	51	adanya kasus pelanggaran disiplin yang tidak terselesaikan dalam 1 Tahun Anggaran	Atasan langsung tidak melaksanakan tugas fungsinya dengan baik dan kurang memahami peraturan serta adanya pengaruh eksternal dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin	C	Tidak segera terealisasinya hukuman disiplin bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin	Meningkatkan koordinasi dengan Innstansi terkait	1	2	2	rendah	Sosialisasi/Bimtek tentang peraturan disiplin kepegawaian	Kabid Kedudukan Hukum dan Kesra Pegawai	1 TA

